



**RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT)**

**DINAS KEHUTANAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban Renstra kepada masyarakat dapat dilihat dari dua jalur utama, yaitu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawaban kinerja. Rambu-rambu jalur pertanggungjawaban keuangan dan kinerja tersebut diatas sudah tertata dengan baik.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu *issue* yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan mengacu pada Revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2015-2019.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan tugas pokoknya terkait melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang kehutanan pada tahun berjalan.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) untuk RPJM ke-3, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2015-2019, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, maka visi Kepala Daerah terpilih Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 adalah: Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari kelima misi diatas yang menjadi tanggungjawab Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah misi kelima.

C. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi kelima yang menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 1. berikut:

Tabel 1. Tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021

No.	Tujuan Organisasi Awal	Tujuan Organisasi Setelah Evaluasi Kementerian PAN-RB	Tujuan Organisasi sesuai Arahan KemenPAN-RB Oktober 2018
1.	Memberikan Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya	Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2.	Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal	Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya.	Meningkatnya Kinerja Organisasi.
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	
4.	Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan,	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	

D. SASARAN

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2016-2021 adalah pada Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2016-2021

No	Tujuan	Tujuan sesuai Arah Kebijakan MenPAN-RB Oktober 2018	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari.	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	%	80	81	82	83	84	85
				Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutanan	%	80	81	82	83	84	85
					%	80	81	82	83	84	85
2.	Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya.		Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	0,18	0,43	1,09	2,00	2,21	2,26
				Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	-	4,15	-	-	-	-
					%	-	-	10	12	14	15
				Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	5	10	-	-	-	-
%	-	-	45		50	55	60				
3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan		Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	5.32	8.50	11.68	14.86	18,03	21.21
4.	Terwujudnya	2. Meningkatnya Kinerja Organisasi.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
				Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM/KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

A. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan Tahun 2020 adalah tahun kelima untuk Renstra Dinas Kehutanan periode Tahun 2016-2021 yang lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Tujuan sesuai arahan MenPAN-RB Oktober 2018	Indikator Tujuan sesuai arahan MenPAN-RB Oktober 2018	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2019		
1.	1.Meningkat nya Kualitas Lingkungan Hidup	1.Persentase penurunan lahan kritis 2.Persentase penurunan jumlah titik panas (hotspot)	Terwujudnya Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100		
				Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	%	84		
				Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	%	84		
			Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	%	2.00		
				Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	14		
				Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	55		
			Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	14.86		
			2.Meningkatnya Kinerja Organisasi.	3.Nilai Evauasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja		BB
						Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/keg.	%	95

Sumber: Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam implementasinya Rencana Kinerja Sasaran diatas akan dicapai dengan melaksanakan Program Pembangunan Kehutanan maupun Program Pendukung lainnya yang terdiri dari Kegiatan-kegiatan Pembangunan Kehutanan maupun kegiatan Pendukung sehingga Pencapaian Kinerja Sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Kinerja Kegiatan. Secara ringkas Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang akan dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2020

DINAS KEHUTANAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	5
URUSAN KEHUTANAN			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.601.860.000,00
- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	- Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 Bulan	136.000.000,00
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kebutuhan air, listrik dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	12 Bulan	558.240.000,00
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- Pembayaran tagihan rekening pajak bumi, bangunan, asuransi bangunan dan kendaraan yang terpenuhi	12 Bulan	18.630.000,00
- Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor	- Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi	12 Bulan	1.500.000.000,00
- Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	12 bln	200.000.000,00
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 bln	188.980.000,00
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	- Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	121.000.000,00
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan	36.300.000,00

- Penyediaan Makanan dan Minuman	- Pertemuan/ rapat yang diselenggarakan	12 Bulan	77.000.000,00
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	- Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah yang diikuti	12 Bulan	709.710.000,00
- Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	- Publikasi kegiatan OPD yang tersedia	12 Bulan	5.500.000,00
- Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	- Wirid kantor dan kegiatan senam kantor	12 bln	50.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	2.178.600.000,00
- Pengadaan Mebeleur	- Kebutuhan Mebeleur yang terpenuhi	5 Unit	86.100.000,00
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	30 Unit	250.000.000,00
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	- Rumah dinas/ mess yang terpelihara	2 Unit	200.000.000,00
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Gedung kantor dinas yang terpelihara	3 Unit	82.500.000,00
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	- Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	12 Bulan	600.000.000,00
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	- peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	287 Unit	165.000.000,00
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	- Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	12 Bulan	200.000.000,00
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	- Rumah Jabatan yang terehabilitasi	12 Bulan	595.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100 %	500.000.000,00
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	- Kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	573 org	500.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lama PNS mengikuti Diklat	100 %	319.000.000,00
- Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Aparatur Sipil Negara yang mengikuti BIMTEK	6 kali	319.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD	100 %	1.917.500.000,00
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan yang tersusun	5 Dok	154.000.000,00

- Penatausahaan Keuangan SKPD	- Penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran yang terlaksana	12 Bulan	697.400.000,00
- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	- Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	5 Dok	363.000.000,00
- Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	- Honorium Pengelola Aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	12 bulan	353.100.000,00
- Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	- Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan Kehutanan yang terlaksana	10 UPTD/ KPH	350.000.000,00
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan dari HHK dan HHBK	84 %	302.000.000,00
- Pembinaan PNBP Sektor Kehutanan	- Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan	10 UPTD/ KPH	302.000.000,00
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase Pencapaian Target Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	84 %	3.385.100.000,00
- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Agam Raya	2 unit	16.500.000,00
- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Pasaman Raya	5 unit	38.500.000,00
- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Sijunjung	2 unit	16.500.000,00
- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 unit	16.500.000,00
- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	3 unit	23.100.000,00

- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	26 unit	192.500.000,00
- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Bukit Barisan	4 unit	27.500.000,00
- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Solok	2 unit	16.500.000,00
- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Mentawai	10 unit	110.000.000,00
- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	- Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	2 unit	16.500.000,00
- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	- Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	20 Kali	150.000.000,00
- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya	- Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.000.000,00
- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya	- Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.000.000,00
- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Sijunjung terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.000.000,00
- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Dharmasraya terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.000.000,00

- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.000.000,00
- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.000.000,00
- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Limapuluh Kota terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.000.000,00
- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan termanfaatkan	3 petak	275.000.000,00
- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Solok terencana dan termanfaatkan	2 petak	110.000.000,00
- Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai	- Jumlah petak pada Wilayah KPH Mentawai terencana dan termanfaatkan	2 petak	165.000.000,00
- Pengembangan Kemitraan Kehutanan	- Jumlah kemitraan yang difasilitasi	4 Unit	242.000.000,00
- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola	1 komoditi	110.000.000,00
- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola	1 komoditi	110.000.000,00
- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola	1 komoditi	110.000.000,00
- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Dharmasraya yang terkelola	1 komoditi	110.000.000,00
- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola	1 komoditi	110.000.000,00
- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola	1 komoditi	110.000.000,00
- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang terkelola	1 komoditi	110.000.000,00
- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola	1 komoditi	209.000.000,00

- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	1 komoditi	110.000.000,00
- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	- Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	1 komoditi	110.000.000,00
Perhutanan Sosial dan Kemitraan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	18,03 %	2.825.400.000,00
- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	- Jumlah SDM pengelola HN, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan yang mengikuti peningkatan kapasitas	180 Org	350.000.000,00
- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Pada KPH Agam Raya	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Agam Raya	3 Kelp	90.000.000,00
- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada KPH Pasaman Raya	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	3 Kelp	90.000.000,00
- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Pada KPH Sijunjung	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Sijunjung	3 Kelp	90.000.000,00
- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Dharmasraya	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 Kelp	60.000.000,00
- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Pesisir Selatan	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	2 Kelp	60.000.000,00

- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Hulu Batang Hari	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	3 Kelp	90.000.000,00
- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Limapuluh Kota	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	3 Kelp	90.000.000,00
- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Bukit Barisan	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	4 Kelp	120.000.000,00
- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat pada wilayah KPH Solok	- Jumlah kelompok/ lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan Hkm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Solok	2 Kelp	60.000.000,00
- Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat	- Jumlah Supervisi, Bimtek dan Pembinaan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan	20 kali	103.400.000,00
- Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	- Jumlah pengelola Perhutanan Sosial yang mengikuti forum	110 Org	192.000.000,00
- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	- Jumlah Koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	1 Kali	27.500.000,00
- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	- Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	1 Kali	27.500.000,00
- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	- Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	1 Kali	27.500.000,00

- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	- Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	1 Kali	27.500.000,00
- Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	- Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	2 Kali	55.000.000,00
- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove	- Jumlah Supervisi dan pembinaan Pengembangan hutan mangrove	5 Kali	75.000.000,00
- Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	- Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkat kapasitas SDM	75 org	400.000.000,00
- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	1 Unit	55.000.000,00
- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	1 Unit	55.000.000,00
- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	1 Unit	55.000.000,00
- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Solok	1 Unit	55.000.000,00
- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	1 Unit	55.000.000,00
- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	1 Unit	55.000.000,00
- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	1 Unit	55.000.000,00
- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	- Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	1 Unit	55.000.000,00
- Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	- Jumlah supervisi dan pembinaan pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang dilaksanakan	8 Kali	100.000.000,00

- Peningkatan Kelas Kelompok Tani	- Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya dari Pemula menjadi Madya	5 Kelp	250.000.000,00
Pemantapan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100 %	1.334.000.000,00
- Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	- Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 km	250.000.000,00
- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Agam Raya	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Agam Raya	3 unit	22.000.000,00
- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pasaman Raya	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	4 unit	27.500.000,00
- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Sijunjung	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Sijunjung	2 unit	16.500.000,00
- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Dharmasraya	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Dharmasraya	2 unit	16.500.000,00
- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Pesisir Selatan	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	1 unit	11.000.000,00
- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Hulu Batang Hari	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	2 unit	16.500.000,00
- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Limapuluh Kota	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	1 unit	11.000.000,00
- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Solok	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Solok	4 unit	27.500.000,00
- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	8 unit	38.500.000,00
- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai	- Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Mentawai	2 unit	27.500.000,00

- Supervisi dan koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	- Jumlah Supervisi dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang dilakukan	20 Kali	344.500.000,00
- Sosialisasi , identifikasi hutan adat dan penangan konflik tenurial	- Jumlah sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial yang dilaksanakan	20 Kali	140.000.000,00
- Pengendalian Perencanaan dan Tata Hutan	- Jumlah buku pengendalian perencanaan dan tata hutan yang disusun	1 buku	385.000.000,00
Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam	Semula : Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani Menjadi : Persentase penurunan laju kerusakan hutan	14 %	5.160.700.000,00
- Pengamanan dan Perlindungan Hutan	- Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	5 Kasus	800.000.000,00
- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Agam Raya	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Agam Raya	25 Kali	176.000.000,00
- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	25 Kali	176.000.000,00
- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Sijunjung	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Sijunjung	15 Kali	66.000.000,00
- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	15 Kali	66.000.000,00
- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	15 Kali	66.000.000,00
- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutananyang dilakukan Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	20 Kali	66.000.000,00
- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	15 Kali	176.000.000,00
- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Solok	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Solok	15 Kali	66.000.000,00

- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	20 Kali	176.000.000,00
- Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan di wilayah kelola KPH Mentawai	- Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan Wilayah Kelola KPH Mentawai	20 Kali	209.000.000,00
- Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	- Pengembangan potensi jasa lingkungan yang difasilitasi	1 Lok	178.200.000,00
- Penyusunan peta laju kerusakan hutan	- Peta Laju Kerusakan Hutan yang tersusun	6 peta	132.000.000,00
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	- Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	450 orang	1.050.000.000,00
- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang Kehutanan yang terlaksana	1 Lap	175.000.000,00
- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	- Wilayah Kelola KPH Agam Raya Yang di Konservasi	1 Lok	82.500.000,00
- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	- Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya Yang di Konservasi	1 Lok	82.500.000,00
- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	- Wilayah Kelola KPH Sijunjung Yang di Konservasi	1 Lok	82.500.000,00
- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	- Wilayah Kelola KPH Dharmasraya Yang di Konservasi	1 Lok	82.500.000,00
- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	- Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan Yang di Konservasi	1 Lok	82.500.000,00
- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	- Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota Yang di Konservasi	1 Lok	82.500.000,00
- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok	- Wilayah Kelola KPH Solok Yang di Konservasi	1 Lok	82.500.000,00
- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	- Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari Yang di Konservasi	1 Lok	82.500.000,00
- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	- Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Yang di Konservasi	3 Lok	247.500.000,00
- Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai	- Wilayah Kelola KPH Mentawai Yang di Konservasi	1 Lok	110.000.000,00
- Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	- Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	1 unit	165.000.000,00
- Pengukuran simpanan karbon	- Tersedianya data simpanan karbon	20 petak	400.000.000,00

Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)	55 %	1.673.600.000,00
- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Agam Raya	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Agam Raya	20 Kali	110.000.000,00
- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	20 Kali	110.000.000,00
- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Sijunjung	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Sijunjung	20 Kali	110.000.000,00
- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Dharmasraya	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	20 Kali	110.000.000,00
- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pesisir Selatan	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	20 Kali	110.000.000,00
- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Hulu Batang Hari	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	20 Kali	110.000.000,00
- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Limapuluh Kota	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	20 Kali	110.000.000,00
- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Solok	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Solok	20 Kali	110.000.000,00
- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Bukit Barisan	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	25 Kali	248.600.000,00
- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Mentawai	- Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Mentawai	20 Kali	195.000.000,00
- Supervisi dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	- Jumlah supervisi dan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	23 Kali	350.000.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	- Persentase penurunan Luas Lahan Kritis - Indeks Tutupan Lahan	2,21 % 61,84 %	3.675.240.000,00
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan	- Lahan kritis di luar kawasan hutan yang ter rehabilitasi	180 Ha	1.500.000.000,00
- Evaluasi Keberhasilan Penanaman N-5	- Monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5 yang dilaksanakan	10 Lokasi	447.000.000,00
- Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	- Kinerja pengelolaan DAS yang terevaluasi dan dokumen DAS yang tersusun	2 DAS	770.000.000,00
- Penyusunan Dokumen Perencanaan RTnRL, RPRL	- Dokumen perencanaan RTnRL dan RPRL yang tersusun	1 Buku	176.000.000,00
- Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	- Jumlah bibit yang berkualitas	250.000 btg	450.000.000,00
- Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	- Sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	7 unit	177.100.000,00
- Konservasi Sumber Daya Genetik	- Terbangun /terpeliharanya sumberdaya genetik	4 unit	155.140.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	851.000.000,00
- Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	- Jumlah data dan informasi kehutanan yang dikembangkan	2 Lap	400.000.000,00
- Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan	- Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	2 Lap	300.000.000,00
- Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan	- Jumlah Neraca Sumber Daya Hutan yang tersusun	1 Buku	151.000.000,00
Total			27.724.000.000,00

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

BAB IV. PENUTUP

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan penjabaran dari visi, misi Pembangunan kehutanan Sumatera Barat dan bagian dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021 serta Rencana Straregis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja lingkup Dinas Sumatera Barat yang selanjutnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja tahun 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unit Kerja lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan yang termuat di dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan target, tolok ukur dan indikator kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel mengacu pada RKT Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dengan sebaik-baiknya.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kehutanan berkewajiban menjamin konsistensi serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan DPA-SKPD Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat sesuai RKT yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%
		b. Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	84%
		c. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	84%
2.	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	a. Persentase penurunan luas lahan kritis	2.00%
		b. Persentase penurunan laju kerusakan hutan	14 %
		c. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	55 %
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	a. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	14.86%
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB
		b. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95%

Padang, Maret 2019
Kepala Dinas Kehutanan



YOZARWARDI UP S.Hut, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690406 199701 1 002

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang mampu menterjemahkan tugas dan fungsi dimaksud. RKT Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

Dengan disusunnya RKT Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Padang, April 2019
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si

NIP. 19690406 199701 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	3
A. Visi	3
B. Misi	3
C. Tujuan	3
D. Sasaran	4
BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019.....	6
A. Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran.....	6
B. Program dan Kegiatan.....	7
BAB IV PENUTUP.....	17
LAMPIRAN.....	18
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019	18